

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini didalamnya berisi rangkuman terkait gambaran secara umum lokasi penelitian yaitu di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. yang mana pada gambaran ini akan dijelaskan meliputi letak geografis Desa Bermi, Jumlah penduduk Desa Bermi, serta profil pemerintah Desa Bermi yang meliputi Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Sejahtera Desa Bermi serta Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) Desa Bermi. disamping itu pada bab ini juga membahas mengenai hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian yaitu sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan *smart village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin Tahun 2022.

Sesuai yang sudah ditulis pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dari itu fokus analisis pada pengkajian pembahasan ini yaitu mengenai, yang pertama, sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan "*smart village*" melalui Bank Sampah Tunas Bringin Tahun 2022, lalu yang kedua yaitu tentang peran pemerintah (*governance*) Desa Bermi dalam mewujudkan *smart village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin. dilanjutkan yang ketiga yaitu terkait penerapan *smart village* yang dilakukan pemerintah Desa Bermi melalui Bank Sampah Tunas Bringin, dan yang terakhir yaitu tentang faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan *smart village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin.

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Bermi.

Desa Berasal dari Perkataan "*dusun*", seperti juga halnya dengan perkataan "*negara*", yang mempunyai arti yaitu tanah kelahiran atau bisa disebut dengan tanah air. Dimana kata tersebut berasal dari *sanskrit*.¹ pengertian desa dapat ditinjau dari berbagai segi, sehingga tidak terdapat rumusan yang seragam. Dalam hal seperti ini juga kita amati dengan adanya beberapa definisi yang dikutip oleh R. Bintarto yang menyatakan bahwasanya Desa ini berfungsi terutama sebagai untuk tempat tinggal. Ini terutama terdiri dari rumah-rumah, pertanian, dengan struktur yang menghubungkannya. Sebenarnya desa itu bisa dikatakan kolaborasi pertemuan antara kegiatan kelompok-kelompok manusia dengan dengan lingkungannya sendiri. dimana bentuk maupun

¹ D. Dilahur, "Geografi Desa Dan Pengertian Desa," *Forum Geografi* 8, no. 2 (2016): 119, <https://doi.org/10.23917/forgeo.v8i2.4826>.

kenampakan di daratan bumi ini merupakan hasil dari interaksi komponen yang mempertemukan antara sosial, politik, ekonomi, fisiografis, budaya, serta interaksinya satu sama lain dan dengan tempat lain. Berikut akan dijelaskan peta wilayah dari Desa Bermi melalui gambar peta yang ada:

Gambar 4.1
Peta Wilayah Desa Bermi



Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Goggle Maps Desa Bermi

Gambar peta diatas kalau dilihat dari secara geografis.² Desa Bermi adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya di lereng sebelah timur dari Gunung Muria dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Desa Bermi sendiri mempunyai jarak sekitar 17 Kilometer dari titik pusat kota Pati. untuk mencapai desa ini dapat mempergunakan transportasi angkot jurusan Pati-Gembong dan dilanjutkan dengan menggunakan jasa ojek sampai desa Bermi. Desa Bermi ini lebih tepatnya desa yang terkenal dengan sebutan Desa Bringin.

Terkait perekonomian yang ada di Desa Bermi itu sendiri adalah penghasil ubi kayu yang menjadi bahan untuk membuat tepung tapioka. Selain itu juga menjadi penghasil biji kapuk pilihan

² NN, "Profil Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati" Wikipedia, 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Bermi,_Gembong,_Pati.

untuk bahan kasar dan campuran tekstil. Pendapatan penduduk rata-rata dari bertani dan menjadi buruh tani.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi yang menjelaskan bahwa:

“Terkait Desa Bermi itu sendiri yaitu desa yang memiliki penduduk yang semuanya beragama islam. Untuk letak Desa Bermi sendiri, yaitu desa yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Kudus disebelah utara ini berbatasan dengan Desa Kedungbulus, lalu disebelah timur berbatasan dengan Desa Banyuurip, Kecamatan Margorejo, dan disebelah selatan berbatasan dengan Desa Sokobubuk, Kecamatan Margorejo, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Kandangmas dan Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.”³

Untuk Lebih jelasnya terkait batasan-batasan wilayah yang ada di Desa Bermi akan di gambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Batas Wilayah Desa Bermi

Batas Wilayah	
Sebelah Utara	Desa Kedungbulus
Sebelah Selatan	Desa Sokobubuk
Sebelah Barat	Desa Kandangmas & Desa Tergo
Sebelah Timur	Desa Banyuurip

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Monografi Desa Bermi Tahun 2023

Desa Bermi memiliki luas wilayah kurang lebih 758,612 Ha. Dengan orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) yaitu 3 KM dari jarak pusat pemerintahan Kecamatan Gembong, lalu 15 KM dari jarak pusat pemerintahan Kota/Kabupaten, dan 90 KM jarak dari pusat Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Terkait orbitrasi di wilayah Desa Bermi lebih jelasnya akan di gambarkan pada tabel dibawah ini :

³ Hasil Wawancara dengan Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.00–10.30 WIB di Kantor Pemerintah Desa Bermi.

Tabel 4.3
Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

Orbitrasi	
Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan	3 KM
Jarak dari pusat pemerintahan Kota	15 KM
Jarak dari Ibukota Kabupaten	15 KM
Jarak dari Ibukota Provinsi	90 KM

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Monografi Desa Bermi Tahun 2023

Dari wilayah yang sudah dijelaskan melalui tabel di atas di Desa Bermi juga terdapat beberapa lembaga pendidikan baik itu yang formal maupun non formal yang ada di Desa Bermi diantaranya ada Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Diniyah, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengan Atas (SMA), serta Pondok Pesantren (Ponpes). tak hanya itu saja, di Desa Bermi juga terdapat yang namanya sarana prasarana yang telah disusun pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Sarana Prasarana Desa Bermi

Sarana Prasarana	
A. Kantor Desa	1 Gedung Kantor
B. Prasarana Kesehatan	
- Poskesdes	1 Gedung
- UKBM (Posyandu, Polindes)	5 titik kegiatan
C. Prasarana Pendidikan	
- Perpustakaan	1 Ruangan
- Paud	1 Paud
- TK	2 TK
- SD/MI	3 SD/ 2 MI
- MTs/SMP	2 Mts/ 1 SMP
- MA/SMA	1 MA/ 1 SMA
D. Prasana Ibadah	
- Masjid	2 Masjid
- Mushola	46 Mushola
E. Prasarana Umum	
- Lapangan Olahraga	1 Lapangan

- Gedung Kesenian/Budaya	1 Gedung Kesenian
- Balai Pertemuan	1 Balai Pertemuan
- Sumur Desa	3 Sumur Desa

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Monografi Desa Bermi Tahun 2023

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan *smart village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) tahun 2022, disini peneliti berusaha untuk mencari sebuah informasi maupun data dengan bertanya serta mewawancarai beberapa informan untuk mengetahui lebih jelas terkait sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan *smart village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi.

1. Deskripsi Data Pemerintah Desa Bermi.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sesuatu komponen sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada desa yang akan menata serta mengawasi lingkungannya sendiri.⁴ selaku lembaga pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat Desa Bermi, tentunya pemerintah Desa Bermi diharapkan bisa untuk menggerakkan kinerja pemerintah Desa Bermi dengan penuh tanggungjawab agar bisa mengubah taraf perekonomian dari masyarakat menuju ke arah yang lebih baik lagi kedepannya.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Bermi pastinya tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah karena pemerintahan Desa Bermi merupakan bagian dari unit terdepan atau bisa dikatakan sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan semua program. Oleh karena itu, tindakan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah termasuk langkah-langkah penguatan masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bermi untuk bisa mewujudkan "*smart village*" di Desa Bermi. dalam tatanan tata kelola pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa Bermi ini terdiri dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga

⁴ Sugiman Fakultas Hukum and Universitas Suryadarma, "Pemerintahan Desa" 7, no. 1 (2018): 82–95.

pemerintah Desa Bermi. Sedangkan pemerintah Desa Bermi ini ya terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Data menuliskan bahwasanya pemerintah Desa Bermi itu sendiri memilki sepuluh petugas jajaran perangkat desa sesuai dibidangnya masing-masing diantaranya ada Kepala Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan dan Anggota Perangkat Desa lainnya. Terkait struktur pengurus pada pemerintah Desa Bermi untuk lebih jelasnya akan digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Data Perangkat Desa Bermi Tahun 2023

Data Perangkat Desa Bermi Tahun 2023		
Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Jabatan
Sutrisno S.P	L	Kepala Desa
Mubasyir	L	Kepala Seksi Pemerintahan
Charisman, S.Pd.I	L	Kepala Seksi Pelayanan
Nasuka	L	Kepala Urusan Keuangan
Ariful Hadi, S.Pd.I	L	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Ernanto S.Pd.I	L	Kepala Dusun
Sudardi	L	Perangkat Desa Lainnya
Nurwati S.Pd.	P	Perangkat Desa Lainnya
Al Qomariyah, S.Pd.	P	Perangkat Desa Lainnya
Ahmad Fadlil, S.E. Sy.	L	Perangkat Desa Lainnya

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Perangkat Desa Bermi Tahun 2023

Terkait tugas serta fungsi dari pemerintah Desa Bermi telah dijelaskan oleh Bapak Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi yang mengungkapkan bahwasanya:

“Jadi begini mas, terkait dengan tugas-tugas dan fungsi desa sendiri, kami juga berpedoman kepada peraturan bupati pati yang telah dijelaskan yang semuanya mengacu pada tugas-tugas kepala desa itu sendiri, tugas dari sekretaris desa itu apa, dan tugas-tugas

dari perangkat desa itu apa, yang jelas pemerintah desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan yang ada di Desa Bermi.”⁵

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya Desa Bermi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya itu mengikuti dari peraturan bupati pati nomor 11 tahun 2018 tentang perangkat desa.⁶ peraturan tersebut juga telah tergambarkan pada visi dan misi yang sekarang diterapkan pada pemerintah Desa Bermi sendiri. secara garis besar nilai-nilai yang tertera pada visi serta misi dari pemerintah Desa Bermi yaitu berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan nantinya, maka pemerintah Desa Bermi dalam periode 2019-2024 menetapkan visi yaitu,⁷ **“Terwujudnya Desa Bermi yang Mandiri dan Sejahtera”**

2. Deskripsi Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga desa yang dibentuk disetiap desa yang ada di seluruh Indonesia.⁸ termasuk di Desa Bermi ini sendiri dalam pemerintahan Desa Bermi juga ada yang namanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan yang namanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dilandasi oleh adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁹ yang mana isi dari undang-undang tersebut yaitu lembaga ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan menjalankan pengawasan sesuai dengan tupoksi tugas serta fungsi legislasi dari lembaga ini.

Hal tersebut telah diterapkan di Desa Bermi sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh bapak H. Kuhari M.Si. selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi yang mengungkapkan bahwasanya:

⁵ Hasil Wawancara dengan Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.00–10.30 WIB di Kantor Pemerintah Desa Bermi.

⁶ Bupati Pati, “Bupati Pati,” *Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor7 Tahun 2018*, no. 6 (2018): 35.

⁷ N.N, “Visi dan Misi Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati,” 2019, <http://www.bermi-gembong.desa.id/visi-misi>.

⁸ Rita Hartati, “Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Di Kabupaten Pangandaran),” *Jurnal Moderat* 534, no. 4 (2018): 114–23.

⁹ Muhibbin Syah, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2004, 1–61.

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bermi yaitu Badan Permusyawaratan yang ada di Desa Bermi yang senantiasa bertugas untuk selalu mengawasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Bermi.”¹⁰

Maka dari itu diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa.

Hal diatas juga sudah dijelaskan oleh Bapak H. Kuhari M.Si yang mengatakan bahwasanya tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi yaitu :

“Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi, ya untuk BPD yang sekarang itu beda dengan dulu, ya dulu itu sama-sama BPD cuma dulu itu singkatannya Badan Perwakilan Desa, dan sekarang berganti menjadi istilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). sehingga fungsinya agak beda, dulu saat saya menjabat BPD yang istilah dulu yaitu Badan Perwakilan Desa itu kewenangannya lebih luas, termasuk disaat itu punya kewenangan untuk menentukan perangkat desa yang dipilih itu siapa, sekarang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan istilah Badan Permusyawaratan Desa itu ya sebagai mitra dari pemerintah Desa Bermi yang bernaung di pemerintahan Desa Bermi. Ya namanya juga permusyawaratan desa, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan oleh pemerintah desa itu didiskusikan dengan Badan Permusyawaratan Desa.”¹¹

Diketahui lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya tanpa adanya yang namanya sebuah kepengurusan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri, terkait profil dan susunan kepengurusan jajaran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bermi telah di jelaskan pada gambar yang ada dibawah ini :

¹⁰ Hasil Wawancara dengan H. Kuhari M.Si sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bermi, pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30-16.30 WIB di Rumah Bapak H. Kuhari M.Si.

¹¹ Hasil Wawancara dengan H. Kuhari M.Si sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bermi, pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30-16.30 WIB di Rumah Bapak H. Kuhari M.Si.

Gambar 4.6
Data Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi Periode Tahun 2019-2025



Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi Tahun 2019-2024.

Gambar diatas menunjukkan struktur kepengurusan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Bermi berdasarkan dengan nama dan jabatan masing-masing. Terkait tugas dari setiap individu akan dijelaskan lebih lengkapnya pada tabel yang ada dibawah ini :

Tabel 4.7
Tugas & Fungsi Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi Periode Tahun 2019-2025

Jabatan	Tugas
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Bermi - Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Bermi & Jajaran Kepengurusan BPD Bermi
Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Membantu Ketua dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Bermi.

Sekretaris Permasyarakatan (BPD)	Badan Desa	Mencatat dan mengarsipkan hasil pembahasan yang telah disepakati dalam Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Bermi.
Anggota Permasyarakatan (BPD)	Badan Desa	Menampung dan menyalurkan aspirasi yang diperoleh dari masyarakat Desa Bermi.

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan tugas-tugas Pengurus Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bermi Tahun 2019-2024

Berikut diatas adalah deskripsi data penelitian yang penulis dapatkan terkait informasi jajaran kepengurusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bermi baik dari struktur organisasi lembaga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) beserta tugas dan fungsinya.

3. Deskripsi Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi.

Pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) itu sendiri menurut Pasal satu peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014.¹² yaitu menerangkan bahwasanya

badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dan pengelolaannya dimiliki oleh desa dan masyarakat melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹³

Hal tersebut juga sama dengan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Bahrudin S.Kom selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi yang menyatakan bahwasanya:

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera adalah sebuah wadah penggerak ekonomi dibawah pemerintahan

¹² Namayanja Annet and Jose Naranjo, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): 2071–79.

¹³ Elma Lazuardiah, Mohammad Balafif, and Anggraeni Rahmasari, “Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera , Desa Pujonkidul , Kecamatan Pujon , Kabupaten Malang , Jawa Timur)” 1 (2020): 9–16, <https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1i1.12>.

Desa langsung yang ditunjuk sebagai pengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) di setiap tahunnya di Desa Bermi.”¹⁴

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 yang berisi tentang kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat agar manusia dapat hidup dengan baik, dapat mengembangkan pribadinya, dan melaksanakan kewajiban sosialnya, maka kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat harus terpenuhi.¹⁵ Terkait tugas beserta fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi pun juga sudah secara jelas telah di ungkapkan oleh Bapak Bahrudin S.Kom yang mengatakan bahwasanya :

“Tugas dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera itu tujuannya mengkonsep sebuah tatanan ekonomi yang disitu belum pernah diciptakan oleh masyarakat desa. otomatis nantinya tujuannya tidak merebut bisnis yang sudah ada dimasyarakat, dan harus membuat bisnis baru yang tidak masyarakat miliki.”¹⁶

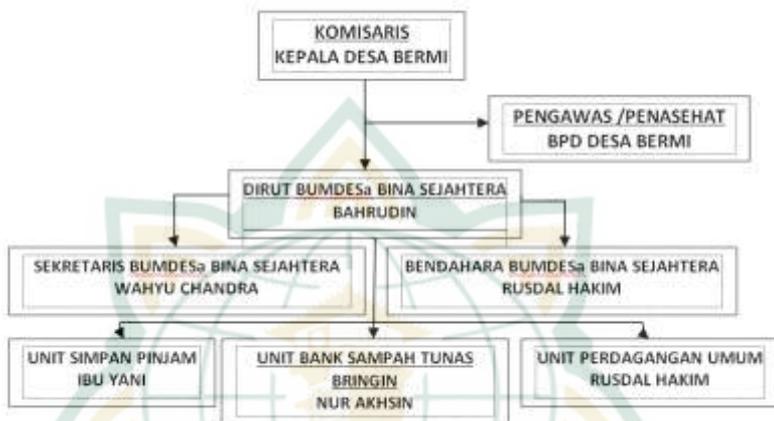
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwasanya peran serta tugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera sebagai sebuah wadah penggerak ekonomi dibawah pemerintahan Desa Bermi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera pastinya juga memiliki tujuan diantaranya meningkatkan perekonomian dengan cara mendirikan usaha-usaha tanpa bertujuan untuk merebut bisnis yang telah dijalankan di masyarakat Desa Bermi.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bahrudin S.Kom sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Bermi, pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Bahrudin S.Kom.

¹⁵ UU Nomor 25 Tahun 2009, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” *UU Nomor 25 Tahun 2009*, no. 57 (2009): 3.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bahrudin S.Kom sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Bermi, pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Bahrudin S.Kom.

Gambar 4.8
Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)
Bina Sejahtera Desa Bermi Periode Tahun 2019-2024



Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Bermi Tahun 2019-2024.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi kini telah memiliki unit-unit usaha yang telah berjalan guna untuk memajukan roda perekonomian pemerintah Desa Bermi. Terkait unit-unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi akan dijelaskan berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi Periode Tahun 2019-2025

Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera		
No	Jenis Usaha	Penanggung Jawab
1)	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP)	Ibu Ahyani
2)	Usaha Kredit Barang Electronic	Bapak Rusydal Hakim
3)	Usaha Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB)	Bapak Nur Aksin

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Bermi Tahun 2019-2024.

Dari data-data yang telah dijelaskan pada tabel diatas, Bapak Bahrudin S.Kom juga menguatkan data tersebut dengan penjelasannya yang mengungkapkan bahwa:¹⁷

“Untuk unitnya di Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera itu sendiri ada 3 mas diantaranya,

- a. Yang pertama ada Unit Simpan Pinjam atau Permodalan itu diketuai oleh Ibu Ahyani.
- b. Terus yang kedua itu Unit Kredit Barang Elektronik yang diketuai langsung oleh saudara Rusydal Hakim.
- c. dan yang ketiga itu Unit Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) itu sendiri yang diketuai oleh Bapak Nur Aksin.”

Unit Simpan Pinjam ini atau Permodalan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian desa, dimana besar pinjaman uang tiap orang bagi pemula yaitu berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah dengan bunga. dan kehadiran lembaga keuangan simpan pinjam ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membantu dengan kebiasaan melakukan tabungan sehari-hari serta memberikan dukungan permodalan.¹⁸

Unit usaha Kredit Barang Electronik yaitu bertujuan untuk pengelolaan barang dengan membangun wadah usaha untuk mencukupi kebutuhan dari masyarakat yang belum ada. Lalu dilanjutkan yaitu unit usaha Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB), nantinya bertujuan menciptakan lingkungan Desa Bermi yang bersih akan sampah dan juga menyadarkan akan pentingnya sampah yang bisa jadi ada nilai jualnya kalau diolah.

Adanya program inovasi desa (PID) dengan terciptanya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi, diharapkan nantinya bertujuan agar masyarakat dapat mengubah pola pikirnya menjadi positif “Sampah bukanlah masalah tetapi menjadi sebuah berkah”. Dimana Sampah anorganik kemudian diolah menjadi suatu barang yang bernilai tinggi. karena perlu kita sadari bahwasanya dalam

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bahrudin S.Kom sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Bermi, pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Bahrudin S.Kom.

¹⁸ Fatchur Rohman and Miftah Arifin, “Model Pertanggungjawaban BUMDes Puji Berkah Pada Unit Simpan Pinjam,” *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang* 5, no. 1 (2020): 18–27, <https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i1.3368>.

dibentuknya unit usaha Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini yaitu karena pastinya alam tidak butuh dengan kata-kata lagi, melainkan alam atau itu lingkungan butuh bukti nyata dari peran masyarakat dalam merawat lingkungan sekitar.¹⁹

Jadi dalam menggerakkan roda perekonomian yang ada di desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi telah memiliki ketiga unit usaha-usaha yang ada untuk menunjang dari pendapatan asli desa (PAD).

4. Deskripsi Data Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) Desa Bermi.

Bank Sampah menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.²⁰ Bank Sampah sendiri juga sebagai upaya dalam memaksimalkan nilai sampah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, hijau dan asri, mengubah perilaku masyarakat, mendidik masyarakat peduli lingkungan dan berorganisasi, meningkatkan kreatifitas, dan memberikan keuntungan bagi penghasil sampah.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Desa Bermi untuk mendirikan yang namanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi yang bertujuan untuk mengupayakan usaha-usaha untuk bisa memaksimalkan serta meminimalisir adanya tumpukan sampah-sampah yang ada di Desa Bermi guna menciptakan lingkungan Desa Bermi yang bersih dan juga sehat. Hal itu juga sependapat dengan yang diungkapkan oleh Bapak Nur Aksin yang menjelaskan tujuannya adanya Bank Sampah di Desa Bermi:

“Jadi gini mas, Komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) adalah komunitas yang terjun dan fokusnya di bidang persampahan atau kebersihan, yang mana komunitas ini didirikan itu karena bertujuan untuk meminimalisir dari keberadaan sampah-sampah yang banyak berserakan di sungai-sungai maupun di titik-titik pojokan dari desa yang sangat cocok untuk dibuang sampah secara sembarangan oleh masyarakat Desa Bermi yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Dan komunitas ini didirikan

¹⁹ Edi Wibowo Kushartono, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fitriie Arianti Universitas Diponegoro Semarang.

²⁰ Menteri Negara Lingkungan Hidup, “Pedoman Pelaksanaan 3R Melalui Bank Sampah,” no. 13 (2012): 1–14, [http://103.52.213.225/hukum/simppu-lhk/public/uploads/files/MLH.P.13\(3\).pdf](http://103.52.213.225/hukum/simppu-lhk/public/uploads/files/MLH.P.13(3).pdf).

berdasarkan juga dari adanya Program Inovasi Desa (PID) yang ada di Desa Bermi. Bank sampah juga bisa dikatakan sebagai suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah dan juga dipilih, yang mana hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.”²¹

Dari hasil pernyataan narasumber melalui wawancara diatas menunjukkan bahwasanya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini didirikan berdasarkan dari adanya program inovasi desa (PID) yang ada di Desa Bermi yang mana komunitas Bank Sampah ini berfokus di bidang kebersihan, yang bertujuan untuk meminimalisir dari keberadaan sampah-sampah yang banyak berserakan di sungai-sungai maupun di titik-titik pojokan dari desa yang sangat cocok untuk dibuang sampah secara sembarangan oleh masyarakat Desa Bermi yang tidak bertanggung jawab sama sekali.

Terkait tugas dan fungsi dari komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang ada di Desa Bermi ini yaitu kurang lebih hampir sama dengan Bank Sampah yang sudah ada pada umumnya, terkait tugas serta fungsi dari Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) sendiri ini sudah diungkapkan juga oleh Bapak Nur Aksin yang telah menjelaskan bahwa:

“Tugas dan fungsi dari Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yaitu menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan desa, mengurangi sampah yang ada di desa, memfasilitasi warga yang mempunyai barang tidak dipakai untuk bisa dijual atau ditabung kepada kami, atau juga bisa dijadikan barang yang bermanfaat. Terkait Bank Sampah ini nantinya juga akan dikelola dengan menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas atau bisa sukarelawan.”²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini dalam sistem pengelolaanya menggunakan sistem perbankan, yang mana itu adalah salah satu bagian untuk bisa memfasilitasi masyarakat Desa Bermi untuk

²¹ Hasil Wawancara dengan Nur Aksin sebagai Ketua Bank Sampah Tunas Bringin Desa bermi, pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Nur Aksin.

²² Hasil Wawancara dengan Nur Aksin sebagai Ketua Bank Sampah Tunas Bringin Desa bermi, pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Nur Aksin.

nantinya bisa menabung barang-barang yang telah tidak terpakai di Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) agar bisa dijadikan uang untuk tambahan penghasilan sehari-hari, atau juga bisa dijadikan barang yang bermanfaat untuk bisa dijual lagi. Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) mempunyai profil dan susunan kepengurusan yang telah di jelaskan pada gambar yang ada dibawah ini :

Gambar 4.10 Data Pengurus Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) Desa Bermi Periode Tahun 2019-2024



Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Pengurus Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) Desa Bermi Tahun 2019-2024.

Terkait sejarah di dirikannya Bank Sampah di Desa Bermi itu sendiri yaitu Bank Sampah ini berdiri sejak tanggal 28 Desember 2019 dengan nama Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB), dimana pertama kali munculnya ide adanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di inisiasi oleh Bapak Bahrudin S.Kom selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi yang kebetulan didampingi langsung oleh bapak Azka Najmus Tsaqib selaku pendamping lokal desa yang ada di Desa Bermi, bersama dengan bapak M. Syarofi, bapak M.

Zaenudin dan bapak Nur Aksin selaku ketua Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang kemudian mendirikan sebuah unit usaha Bank Sampah.

Prosesnya sendiri, diketahui pada awal bulan Mei tahun 2020 Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini akhirnya diresmikan dan kemudian diakuisisi menjadi salah satu unit yang tergabung pada usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera dan mendapatkan permodalan. dalam perkembangannya, lebih tepatnya pada tanggal 1 juni 2020 komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini mengembangkan sayap dalam usahanya untuk mengelola jasa penjemputan sampah rumah tangga.

Sejak diakuisisi oleh salah satu unit Badan Usaha Milk Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera, Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) sampai saat ini mempunyai nasabah atau anggota sebanyak 250 nasabah aktif untuk sampah basah, dan 100 nasabah aktif untuk sampah kering. Dalam struktur organisasi Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini mempunyai 15 orang anggota keseluruhan yang dibagi menjadi 5 Personil BPH, 4 Personil Sampah Kering, 4 Personil di Unit Perdagangan dan 2 orang karyawan tetap di Sampah Basah dengan gaji Rp. 1,500,000/Bulan.

Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini dalam pengelolaanya mempunyai empat unit yang sudah berjalan, untuk lebih jelasnya akan digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11
Unit Usaha Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) Desa Bermi
Periode Tahun 2019-2024

Unit Usaha Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB)		
No	Unit Usaha	Penanggung Jawab
1.	Unit Sampah Basah	Nur Rohim
2.	Unit Sampah Kering	Nur Aksin
3.	Unit Perdagangan Umum	Bahrudin
4.	Unit Sinoman	M. Syarofi

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Unit Usaha Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) Desa Bermi Tahun 2019-2024.

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwasanya ada empat (4) unit usaha yang ada didalam komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi. Terkait dengan pengertian dan tugas-tugas dari keempat unit yaitu :

a. Unit Sampah Basah

Unit Sampah Basah ialah unit yang diketuai oleh Bapak Nur Rokhim yang dibantu oleh kedua petugas yaitu Saudara Taqwin dan Saudara Abdul yang berkecimpung di bidang sampah basah, yang tugas-tugas dari Bank Sampah Basah ini setiap harinya yaitu berkeliling ke masyarakat Desa Bermi yang memiliki sampah untuk bisa diangkut oleh petugas untuk nantinya bisa dipilah dan dipilih terlebih dahulu, baru nanti dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA). baik itu sampah basah dari perumahan atau UMKM yang ada di Desa Bermi.

Untuk sistem kerjanya diantaranya yaitu admin melakukan promosi pendaftaran kepada nasabah, lalu calon nasabah menghubungi admin untuk mendaftar, dan nasabah yang sudah tergabung nantinya akan membayar retribusi penjemputan sampah/(25.000 per bulan), setelah adanya pembayaran nanti petugas mengambil sampah rumah tangga nasabah tersebut sesuai jadwal.

b. Unit Sampah Kering

Unit Sampah Kering ialah unit yang diketuai oleh Bapak Nur Aksin sendiri yang dibantu oleh anggota kepengurusan yang lain di bidang sampah kering, terkait tugas-tugas dari Bank Sampah Kering ini setiap harinya yaitu berkeliling ke masyarakat Desa Bermi yang memiliki sampah khususnya sampah kering untuk bisa diangkut oleh petugas untuk nantinya bisa dipilah terlebih dahulu, baru nanti didaur ulang untuk bisa dibuat kerajinan tangan atau bisa dijual lagi.

Untuk sistem kerja dari Bank Sampah Kering ini diantaranya yaitu, nasabah melakukan permohonan penjemputan, lalu admin menjadwalkan penjemputan sekaligus petugas melakukan pencatatan, mengambil dan menimbang sampah.

c. Unit Perdagangan Umum

Unit Perdagangan Umum ialah unit yang diketuai oleh Bapak Bahrudin S.Kom guna untuk membantu unit kredit barang elektronik yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera, Unit Perdagangan Umum ini unit yang bertujuan untuk pengembangan peningkatan penghasilan melalui perdagangan umum seperti jual makanan, minuman dll yang ada di Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).

Untuk sistem kerja dari unit perdagangan umum ini diantaranya yaitu, admin melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat, lalu masyarakat desa melakukan

permohonan dan permintaan kebutuhan, yang terakhir admin mencatat baru petugas mengirimkan kebutuhan dari masyarakat tersebut.

d. Unit Sinoman

Unit sinoman ialah unit yang diketuai oleh bapak M. Syarofi yang berfokus pada jasa pelayanan untuk sinoman saat ada acara yang dilaksanakan oleh warga desa itu sendiri seperti hajatan, Khitanan, maupun nikahan.

Terkait sistem kerja dari unit sinoman yang ada di Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yaitu, masyarakat melakukan permohonan jasa sinoman, terus petugas dan admin menghitung biaya jasa sinoman, kalau sudah cocok baru admin dan masyarakat yang membutuhkan jasa kami melakukan negosiasi dan penjadwalan, habis ada kesepakatan baru petugas hadir ke lokasi sesuai jadwal yang telah ada dalam kesepakatan.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Sistem Politik Pemerintah Desa Bermi Dalam Mewujudkan *Smart Village* Melalui Bank Sampah Tunas Bringin.

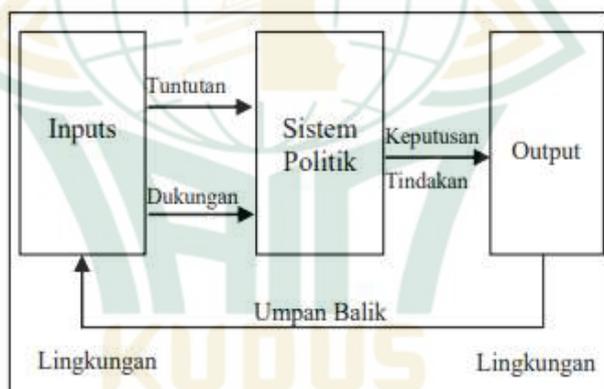
Hadirnya sistem politik pada Pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) adalah suatu upaya untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang baik. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa proses, perencanaan, serta perumusan untuk dijadikan sebuah kebijakan atau aturan-aturan yang harus sesuai dengan yang terjadi pada masyarakat di Desa Bermi. Teori utama dari sistem politik yang digunakan peneliti dalam analisis hasil utama yaitu menggunakan analisis teori sistem politik David Easton, alasan kenapa peneliti memilih teori tersebut, karena dalam teori tersebut pemerintah Desa Bermi sangat cocok dalam menerapkan teori tersebut pada pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) yang ada di pemerintahan Desa Bermi.

Teori sistem David Easton merupakan model sederhana dari proses lahirnya kebijakan publik, dan pastinya pembahasan dengan teori ini tidak terbatas pada satu bidang kebijakan publik yang akan dikeluarkan. Perlu diketahui bahwa sebuah kebijakan publik dapat dibuat ataupun diubah karena adanya partisipasi masyarakat.²³ maka dari itu teori sistem politik menurut David Easton tersebut Sangat cocok untuk diaplikasikan oleh pemerintah Desa Bermi

²³ Lince Magriasti, “Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah : Analisis Dengan Teori Sistem David Easton,” 2011.:257.

yang dapat dilihat dengan adanya sebagian tuntutan dan dukungan dari masyarakat Desa Bermi yang ingin membuat dan menciptakan yang namanya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi terhadap pemerintah, lalu pemerintah Desa Bermi membuat yang namanya sistem politik agar ada yang namanya tindakan, setelah ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bermi, akhirnya ada yang namanya sebuah keputusan atau bisa disebut dengan istilah *output*, *output* itulah yang akhirnya memutar untuk memberikan suatu jawaban terhadap tuntutan dan dukungan diawal. Untuk bisa memahami hal diatas akan dijelaskan dengan konsep yang telah digambarkan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.12
Model Sistem Politik Pemerintah Desa Bermi dalam Mewujudkan *Smart Village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin



Sumber : Model sistem politik David Easton

Dalam analisis data diatas akan dibahas mengenai sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB). Demi mencapai sistem politik yang diharapkan oleh masyarakat Desa Bermi, maka pemerintah Desa Bermi menerapkan apa yang harus diterapkan oleh masyarakat, yaitu dengan memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan tuntutan dan dukungan oleh masyarakat itu sendiri.

Hal tersebut telah dijelaskan pada gambar diatas yang terdapat beberapa unsur-unsur dalam sistem politik pada pemerintah Desa Bermi diantaranya adanya *input*, *konversi*

(proses), *output*, *feedback*, dan lingkungan.²⁴ Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bagaimana sistem politik itu dapat bekerja, dan pada gambar diatas pula telah dijelaskan dengan adanya *input* yang berupa tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*) yang kemudian dilanjutkan dengan *konversi* untuk diakhiri menjadi *output*, yaitu berupa keputusan atau kebijaksanaan. *Konversi* ini ibarat sebuah *black box* mengingat tidak banyak publik yang mengetahui proses yang terjadi di dalamnya. Setelah menjadi *output*, ada umpan balik (*feedback*) melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi *input*.

Serta adanya *input* dalam sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang berbentuk tuntutan dan dukungan, hal tersebut muncul karena sebagian warga masyarakat Desa Bermi yang dirasa ingin adanya yang namanya sebuah komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) melalui Program Inovasi Desa (PID) dari kementerian desa (KEMENDESA) terhadap desa-desa. sebagian masyarakat Desa Bermi ingin adanya yang namanya Komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi agar nantinya dapat berguna untuk mengurangi sampah-sampah yang berserakan di berbagai titik-titik di Desa Bermi itu sendiri.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Azka Najmus Tsaqib M.Pd bahwasanya:

“Jadi ini ya berdasarkan dari pendampingan yang telah saya lakukan sejak ditahun 2017, setiap desa itu kan mempunyai kewenangan lokal sendiri-sendiri, ada desa yang konsenya Bank Sampah lalu ada desa yang konsenya desa wisata ada desa yang memang fokus ke infrastruktur, mungkin kalau di Desa Bermi itu memang ditahun 2019 itu kan ada program dari kementerian desa (KEMENDESA) namanya itu Program Inovasi Desa (PID). Jadi disetiap desa itu mempunyai inovasi sendiri-sendiri, termasuk salah satu inovasi yang ada di Desa Bermi yaitu Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB). Nah mungkin memang dari situ perwujudan dalam sebuah upaya menjadi desa mandiri atau *smart village*.”²⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Azka Najmus Tsaqib M.Pd. diatas selaku pendamping lokal desa di Desa Bermi telah

²⁴ Lince Magriasti, “Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah : Analisis Dengan Teori Sistem David Easton,” 2011: 254.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Azka Najmus Tsaqib M.Pd sebagai Pendamping Lokal Desa Bermi, pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Azka Najmus Tsaqib M.Pd.

menunjukkan bahwa Berdasarkan dari pendampingan yang beliau telah lakukan sejak di tahun 2017, Desa Bermi itu sendiri memang ditahun 2019 terdapat suatu program dari kementerian desa (KEMENDESA) yang namanya program inovasi desa (PID). Pada program tersebut disetiap desa itu mempunyai inovasi sendiri-sendiri, termasuk salah satu inovasi yang ada di Desa Bermi yaitu Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) itu sendiri.

Input itu sendiri terdiri atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*). Perlu adanya sebuah manajemen bagi tuntutan itu sendiri. dan kelebihan tuntutan nanti akan mengakibatkan beban berlebihan (*overload*) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap tuntutan, baik melalui institusi. Selain tuntutan, suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan tuntutan mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut.

Input juga diperlukan dalam sistem politik itu sendiri karena berfungsi sebagai sumber energi. karena masyarakat selanjutnya akan menuntut berbagai kebutuhan, termasuk tingkat kesehatan, pendidikan, dan layanan, dan sebagainya. tidak semua tuntutan ini dapat dipenuhi, beberapa mungkin puas dengan relatif mudah, sementara yang lain membutuhkan sumber daya dan perhatian khusus.²⁶

Seperti halnya dukungan yang sama dalam mendirikan Bank Sampah di Desa Bermi juga diungkapkan oleh Bapak Nur Aksin selaku Ketua Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang menjelaskan bahwasanya:

“Terkait tanggapan dari saya selaku Ketua Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi ini, dengan adanya sistem politik yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menciptakan sebuah komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) guna mewujudkan “*smart village*” untuk mewujudkan desa cerdas di Desa Bermi, dari saya pribadi sangatlah setuju dan pastinya sangat mendukung, karena apa? Secara tidak langsung adanya sistem politik tersebut dengan terciptanya Bank Sampah di Desa Bermi menjadikan tujuan yang sangat positif yang harus bisa didukung oleh beberapa elemen, diantaranya yaitu harus adanya dukungan dari masyarakat Desa Bermi dan jajaran kepengurusan dari pemerintah desa agar nantinya bisa saling bersinergi untuk membuat desa yang bersih dan menciptakan lingkungan desa yang

²⁶ Toto Pribadi, Ali Muhyidin, and Susanti, “Pendekatan Analisis Sistem Politik,” *Sistem Politik Indonesia*, 2017, Hal 6.

sehat akan penyakit. Karena kita tahu sendiri peran dari pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak perwujudan yang mewakili dari masyarakat desa. apabila pemerintah desanya mempunyai inisiatif untuk desanya lebih maju, pastinya masyarakat juga akan ikut menjadi maju juga.”²⁷

Hasil wawancara diatas dengan Bapak Nur Aksin selaku Ketua Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi menunjukkan bahwasanya secara tidak langsung adanya sistem politik tersebut dengan terciptanya komunitas Bank Sampah di Desa Bermi menjadikan tujuan yang sangat positif yang harus bisa didukung oleh beberapa elemen, diantaranya yaitu adanya dukungan dari masyarakat Desa Bermi dan jajaran kepengurusan dari pemerintah desa agar nantinya bisa saling bersinergi untuk membuat desa yang bersih dan menciptakan lingkungan desa yang sehat akan penyakit. Karena kita tahu sendiri peran dari pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak perwujudan yang mewakili dari masyarakat desa itu sendiri.

Setelah adanya *input* dari masyarakat desa, dan *input* diterima oleh pemerintah desa pastinya pemerintah Desa Bermi nantinya juga mengeluarkan yang namanya *output* atau kebijakan. terkait terjadinya sebuah *output* didalam sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang semula perwujudan dari bentuk sebuah tuntutan dan dukungan, hal itu karena adanya respon dari pemerintah Desa Bermi yang dirasa ingin adanya suatu keputusan atau tindakan dari tuntutan masyarakat Desa Bermi untuk adanya sebuah komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) dalam program inovasi desa (PID) dari Kementerian Desa (Kemendesa).

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi yang menjelaskan bahwasanya:²⁸

“Nggeh, terkait dengan tata kelola pemerintahan ini memang kami selalu berusaha untuk membuat pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, kemudian masyarakatnya juga mengetahui. Kemudian dari segi transparansi dan akuntabilitas semua penyelenggaraan pemerintahan ini kami selalu terbuka, kemudian

²⁷ Hasil Wawancara dengan Azka Najmus Tsaqib M.Pd sebagai Pendamping Lokal Desa Bermi, pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Azka Najmus Tsaqib M.Pd.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.00-10.30 WIB di Kantor Pemerintah Desa Bermi.

terkait dengan masyarakat yang pintar, ekonomi yang pintar, kemudian lingkungan yang baik ini kami juga selalu berusaha terkait dengan adanya Bank Sampah yang berdiri ditahun 2019 ketika saya menjabat pertama kali untuk menjadi Kepala Desa Bermi ini kami tumbuhkan sebuah komunitas yang namanya Bank Sampah Tunas Bringin yang sampai saat ini juga masih berjalan, ini juga bertujuan untuk selain provit keuntungan, walaupun saat ini keuntungan belum besar namun hanya saja mengedepankan agar Desa Bermi menjadi desa yang bersih, jadi aspek sosial ini sangat penting dibandingkan keuntungan semata.”

Hasil wawancara diatas dengan Bapak Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi menunjukkan bahwasanya terkait dengan tata kelola pemerintahan pada pemerintahan Desa Bermi yaitu selalu berusaha untuk bisa membuat suatu pemerintahan yang bisa berjalan dengan baik, agar nantinya masyarakat juga mengetahui baik dari segi *transparansi* dan *akuntabilitas*. Agar pemerintahan Desa Bermi ini juga bisa selalu terbuka dalam semua penyelenggaraannya baik dalam mengedepankan masyarakat yang pintar, maupun ekonomi yang pintar. Kemudian pemerintah Desa Bermi juga sudah berusaha memikirkan untuk menjadikan lingkungan yang baik dengan adanya Bank Sampah yang berdiri ditahun 2019 ketika beliau menjabat pertama kali untuk menjadi Kepala Desa Bermi. beliau menumbuhkan sebuah komunitas yang namanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang sampai saat ini juga masih berjalan untuk bisa mengedepankan Desa Bermi menjadi desa yang bersih, jadi aspek sosial ini sangat penting dibandingkan keuntungan semata.

Wawancara diatas adalah bagian dari jawaban hasil tuntutan yang telah diseleksi, dan akan mengalami proses yang mana hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijaksanaan tertentu (*output*). apabila nantinya *output* sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan (*re-newed supports*). Serta pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dihasilkan di *output* melalui *feedback loop*. dan *output* pun harus diinformasikan agar memperoleh tanggapan.

Seperti tanggapan yang telah diungkapkan oleh Bapak Bahrudin S.Kom selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa

(BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi yang mengungkapkan bahwa:²⁹

“Selain kita itu konsen pada Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) itu sendiri, juga kita sebagai warga Desa Bermi kita juga konsen terhadap sampah yang ada di Desa Bermi, karena sampah-sampah yang dihasilkan oleh pondok pesantren itu sendiri yang ada di Desa Bermi kira-kira diatas 100 kg per harinya dan konsen kita disitu, selain itu penyumbang sampah yang kedua itu dari pelaku UMKM. Nah kita berfikirnya dari situ, dan dari produk situ di Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) itu mempunyai produk turunan lagi yaitu mengelola sampah kering, dan sampah kering ini bisa dijadikan uang, dan bisa dijadikan keuntungan lain selain iuran bulanan nasabah dalam pengambilan sampah, apalagi warga Desa Bermi awal mulanya dulu itu belum bisa mengenal yang namanya penjemputan sampah, dan lebih bermeset untuk membuang sampah sembarangan baik di sungai maupun diselokan lingkungan sekitar karena sifatnya gratis. Dan warga hanya mengira membuang sampah disembarang tempat itu tidak ada dampaknya karena yang membuang tidak merasakan dampaknya padahal pasti ada dampaknya, dan dari situlah kita prihatin, paling nggak kita tidak 100% mengurangi sampah tapi kita sudah berusaha mengurangi sampah di desa bermi walaupun belum 100%.”

Tanggapan dari hasil wawancara diatas dengan Bapak Bahrudin S.Kom telah menunjukkan bahwasanya adanya bentuk kepedulian dari sebagian masyarakat Desa Bermi akan prihatin banyaknya sampah di Desa Bermi yang dibuang oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, karena masyarakat lebih bermeset untuk membuang sampah sembarangan baik di sungai maupun diselokan lingkungan sekitar karena sifatnya gratis. dan warga hanya mengira membuang sampah disembarang tempat itu tidak ada dampaknya karena yang membuang tidak merasakan dampaknya padahal pasti ada dampaknya. Semoga dengan adanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini paling tidak 100% bisa mengurangi sampah, yang terpenting sudah berusaha mengurangi sampah di Desa Bermi walaupun belum 100%.

Selanjutnya setelah adanya *input* serta *output* pastinya keduanya akan diikuti dengan yang namanya lingkungan

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bahrudin S.Kom sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Bermi, pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Bahrudin S.Kom.

masyarakat, untuk lingkungan masyarakat sendiri oleh Easton dibagi dalam empat sistem, yaitu sistem ekologi, sistem biologi, sistem kepribadian, dan sistem sosial. Pertama, sistem ekologi merupakan semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi organik nonhumanis dari kehidupan manusia. Kedua, Sistem biologi mengacu pada susunan biologis manusia dari suatu masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh pembentukan perilaku politik tertentu, Ketiga, sistem kepribadian. Pemahaman mengenai sistem kepribadian akan membantu untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama, Keempat, sistem sosial. Easton mengelompokkan sistem sosial dalam beberapa sistem, yaitu sistem budaya, sistem ekonomi, sistem demografi, dan struktur sosial.³⁰

Terkait lingkungan masyarakat pada sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan *smart village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) dalam implementasinya telah dijelaskan oleh Bapak Kuhari. M.Si selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi yang menegaskan bahwa:³¹

“Ya adanya sistem politik yang ada pada pemerintah Desa Bermi dalam menciptakan yang namanya Bank Sampah di Desa Bermi itu bisa dibilang alhamdulillah, karena dengan hadirnya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi itu sendiri agar terjadi kebersihan yang dibilang baik sekali, karena bisa meminimalisir tempat-tempat yang tidak pantas untuk dibuang sampah dititik-titik yang ada di Desa Bermi. Seperi contoh di kali serut, kali mbendo, kali kesambi dan dipojok-pojok desa itu dibuang sampah oleh masyarakat. namun setelah hadirnya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi dengan diberikannya pengertian, edukasi oleh pemerintah desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bermi dalam memberikan gambaran-gambaran terkait kebersihan-kebersihan dan seterusnya, akhirnya Alhamdulillah sedikit demi sedikit masyarakat kita sadar akan kebersihan sehingga sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat. tidak hanya bagi masyarakat Desa Bermi saja tapi juga warga yang ada di daerah pati timur seperti juwana dll. karena kalau kita amati sendiri

³⁰ Toto Pribadi, Ali Muhyidin, and Susanti, “Pendekatan Analisis Sistem Politik,” *Sistem Politik Indonesia*, 2017, Hal 9.

³¹ Hasil Wawancara dengan H. Kuhari M.Si sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bermi, pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30-16.30 WIB di Rumah Bapak H. Kuhari M.Si.

jika sampah kalau dibuang di kali/sungai lalu diselokan itu saat terbawa air hujan akan merugikan daerah yang ada di dataran rendah sana. Jadi bisa dibilang dengan hadirnya Bank Sampah ini itu perwujudan dari realisasi pemerintah desa.”

Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak Kuhari M.Si bahwasanya telah menjelaskan bahwasanya adanya sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi telah dijalankan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keterlibatan beberapa elemen, baik dari elemen partisipasi masyarakat maupun partisipasi pemerintah Desa Bermi dengan adanya tuntutan dan dukungan yang bisa disebut dengan *input*, lalu ada tindakan atau keputusan yang nantinya bisa menjadi suatu *output*. Dan pastinya juga ada yang namanya timbal balik yang dibarengi dengan adanya lingkungan hidup.

2. Peran Pemerintahan yang cerdas (*Good governance*) Desa Bermi Dalam Mewujudkan *Smart Village* Melalui Bank Sampah Tunas Bringin.

Guna mewujudkan “*smart village*” di Desa Bermi melalui yang namanya Komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB), pemerintah Desa Bermi harus dapat bekerja sama dengan masyarakat Desa Bermi. seperti yang telah selama ini diketahui adanya peranan keduanya yaitu pemerintah Desa Bermi dan masyarakat Desa Bermi sangatlah memiliki tanggungjawab masing-masing dalam mewujudkan yang namanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga keduanya dapat bekerjasama agar bisa sama-sama saling terbuka dalam mengidentifikasi berbagai problematika yang telah terjadi di ranah desa.

Untuk mewujudkan yang namanya “*smart village*” di Desa Bermi melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB), pastinya hal tersebut juga dibarengi dengan adanya yang namanya tata kelola pemerintahan Desa Bermi yang baik atau bisa disebut “*good governance*”, yang mana pemerintah desa disini memiliki peran sebagai pengambil keputusan dan tidak dapat berkerja sendiri tanpa adanya peran serta ikut andil dari masyarakat. karena masyarakat disini merupakan sebuah penggerak dari keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. jadi haruslah ada yang namanya hubungan saling dukung mendukung serta kerjasama antara peran pemerintah Desa Bermi dengan masyarakat Desa Bermi agar dapat

menjalankan yang namanya “*good governance*” terlebih dahulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa untuk mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).³²

Hal tersebut juga telah diungkapkan oleh Bapak Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi terkait harus ada hubungan yang mempunyai tujuan yang sama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah Desa Bermi, beliau menjelaskan bahwasanya:

“Alhamdulillah, semua program yang ada di desa ini kalau memang tidak didukung oleh masyarakat ya tinggal program saja, tapi kalau program itu sendiri dibuat dan mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat, saya rasa program itu bisa berjalan, karena keterlibatan masyarakat itu sangatlah penting, karena yang menjadi sasaran atau objek yang bisa menikmati yaitu dari masyarakat Desa Bermi itu sendiri. Ya alhamdulillahnya dari jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus RT maupun RW juga sangat antusias ketika kami ingin mendirikan komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi.”³³

Hasil wawancara diatas telah disampaikan bahwasanya program-program atau pelayanan yang telah ada di Desa Bermi pastinya harus didukung oleh masyarakat Desa Bermi juga. Karena yang menjadi sasaran atau objek dari program nantinya adalah masyarakat sendiri.

Agar hubungan antara tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta bisa terwujud, maka yang disebut dengan “*good governance*” harus dipraktikkan. Ketiga unsur tersebut harus sama, sederajat, dan seimbang dalam peranannya sehingga dapat saling mengontrol.

Hal itu juga telah dijelaskan pada Al Qur’an surah Al Hud ayat 61 yang berbunyi:³⁴

³² Chiara Berlian and Bara Suhendis, “Penerapan Prinsip Good Governance Pandangan Media Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 Skripsi Fakultas Syariah Pandangan Media Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 Disetujui Pembimbing,” 2024.

³³ Hasil Wawancara dengan Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.00–10.30 WIB di Kantor Pemerintah Desa Bermi.

³⁴ Muhamad Yoga Firdaus, “Tafsir Surah Hud Ayat 61: Menyelami Ekoteosentrisme,” tanwir.id, 2021, <https://tanwir.id/tafsir-surah-hud-ayat-61-menyelami-ekoteosentrisme/>.

وَالِىٰ تَمُوْدَ اٰحَاھُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ یٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ۗ هُوَ اَنْشَاَکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَکُمْ فِیْهَا فَاَسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَیْهِ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ

Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

Ayat diatas menjelaskan misi utama manusia sendiri adalah untuk membangun bumi.³⁵ Dan hal tersebut bisa diimplementasikan melalui suatu yang namanya pemerintahan atau “governance”.

UNDP juga mengemukakan bahwasanya pengertian “governance” dalam menjadikan yang namanya “good governance” itu didukung oleh tiga kaki yakni politik, ekonomi dan administrasi. kaki pertama yaitu tata pemerintahan di bidang politik, lalu kaki kedua yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi, dan sedangkan untuk yang terakhir yaitu kaki ketiga tata pemerintahan di bidang administrasi.³⁶

Dalam konsep “governance” paling dasar, bahwasanya telah disebutkan ada tiga stakeholder utama yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing, ketiga tersebut yaitu negara atau pemerintah (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sektor*) dan masyarakat (*society*). Dalam menjalankan yang namanya “governance” perlu yang namanya adanya peran dari masyarakat untuk bisa memunculkan sebuah partisipasi. Karena dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik, partisipasi adalah salah satu bagian dari komponen tersebut yaitu *society*. hal tersebut sangatlah sesuai dengan tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah.³⁷

³⁵ Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma),” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 25, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>.

³⁶ Rahmanurrajjid Amin, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah,” 2008, 1–155.

³⁷ M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis,” *Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 883–902.

Bisa dilihat dalam pernyataan Bapak Kuhari M.Si selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah menjelaskan bahwasanya terkait peran pemerintah Desa Bermi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi:

“Menurut analisis saya selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bermi untuk peran pemerintah Desa Bermi itu sudah sesuai, kenapa saya bilang sudah sesuai dan bagus, karena semenjak didirikannya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera di Desa Bermi itu bisa tercipta sesuai harapan dengan apa yang diharapkan oleh beberapa masyarakat, walaupun juga pastinya terdapat kekurangan, hal itu pun juga sudah bisa dimaklumi. Karena semua manusia hakikatnya tidak ada yang sempurna dalam mengelola apapun itu.”³⁸

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya peran dari pemerintah Desa Bermi sendiri dalam melaksanakan tata kelola yang baik itu sudah sesuai, semua itu bisa dilihat karena sebagian sudah memenuhi dari apa yang telah diharapkan oleh masyarakat Desa Bermi. hal itu semua tidak lepas dari pemerintah Desa Bermi yang memahami atas prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintah itu sendiri. bahwasanya kunci utama dalam memahami “*good governance*” adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.³⁹

Menurut UNDP sendiri sebagai institusi global membagi 9 (sembilan) karakteristik prinsip-prinsip dari “*good governance*”, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi (*Participation*)

Baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi lembaga-lembaga terkemuka yang mewakili kepentingan mereka, setiap anggota masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Kebebasan berserikat, berekspresi, dan keterlibatan konstruktif berfungsi sebagai landasan dari partisipasi ini.

³⁸ Hasil Wawancara dengan H. Kuhari M.Si sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bermi, pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30-16.30 WIB di Rumah Bapak H. Kuhari M.Si.

³⁹ Kadek Cahya and Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” 2, no. 2 (2019): 218–34.

- b. Aturan hukum (*Rule of law*)
Secara khusus, undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus diterapkan sesuai dengan keadilan dan objektivitas.
- c. Transparansi (*Transparency*)
Keterbukaan arus informasi berfungsi sebagai landasan transparansi. Informasi, institusi, dan prosedur tersedia bagi orang yang membutuhkannya. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.
- d. Daya tangkap (*responsiveness*)
Setiap “*stakeholder*” harus dilayani oleh institusi dan proses.
- e. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), Untuk mencapai keputusan terbaik bagi kepentingan yang lebih besar baik dari segi kebijakan maupun proses, “*good governance*” menjadi perantara berbagai kepentingan.
- f. Berkeadilan (*Equity*)
Semua warga negara, Setiap orang, laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan untuk memelihara atau meningkatkan kesejahteraannya.
- g. Efektivitas dan efisien (Efektiveness and dan efisiensi)
Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.⁴⁰
- h. Akuntabilitas (*Accountability*)
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- i. Visi Strategi (*Strategi Vision*)
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif “*good governance*” dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
Dari analisis hasil penelitian diatas bisa dilihat berbagai implementasi-implementasi yang telah dilakukan pemerintah Desa Bermi dalam menerapkan prinsip-prinsip “*good governance*” di Desa Bermi didalam tabel di bawah ini:

⁴⁰ Nunuk Febrianingsih, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Public Informaon Disclosure in Open Government Towards Good Governance)” 1, no. April (2012): 135–56.

Tabel 4.13
Hasil pelaksanaan prinsip *good governance* yang telah diterapkan pada pemerintah Desa Bermi

No	Kriteria	Bentuk	Pelaksanaan
1.	Partisipasi	Melibatkan seluruh pihak untuk bisa saling mengambil keputusan.	Terlaksananya kegiatan Musdus di tingkat RT maupun RW dan Musrengbangdes di Desa Bermi.
2.	Aturan hukum	Memberantas adanya Korupsi, Kolusi, Nepotisme.	Memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Bermi tanpa adanya pembungutan biaya.
3.	Transparansi	Memberikan sebuah informasi yang jelas kepada masyarakat.	Menyampaikan pengumuman baik secara langsung maupun tidak melalui surat edaran dari pemerintah Desa Bermi.
4.	Daya tanggap	Melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan.	Melayani masyarakat Desa Bermi dalam pembuatan surat keterangan E-KTP, KK, Ijin pindah tempat, dan masih banyak yang lainnya.
5.	Berorientasi pada consensus	Kesesuain mengambil keputusan.	Sudah terlaksananya musyawarah secara bersama melalui rapat yang telah diselenggarakan
6.	Berkeadilan	Memberikan hak kepada masyarakat.	Sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya pilih kasih atau pandang bulu.
7.	Efisiensi dan Efektivitas	Meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah bagi masyarakat.	Terlaksananya program yang diharapkan oleh masyarakat desa bermi seperti program pembangunan dan inovasi desa seperti Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).
8.	Akuntabilitas	Mempertanggungjawabkan kinerja	Membuat laporan pertanggungjawaban dan

		pemerintah.	disetorkan kepada atasan yaitu kecamatan.
9.	Visi strategis	Masyarakat dan pemerintah memiliki pandangan yang sama untuk terciptanya suatu pemerintahan.	Menjalin kerjasama terhadap proses dan kinerja pemerintah dan saling memberikan arahan untuk terciptanya suatu program.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data hasil penelitian prinsip *good governance* yang telah diterapkan pada pemerintah Desa Bermi.

3. Penerapan *Smart Village* Pada Pemerintah Desa Bermi Melalui Bank Sampah Tunas Bringin.

Penerapan dari "*smart village*" yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bermi merupakan sebuah wewenang yang dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat dengan melalui yang namanya adanya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi. Gagasan dari desa cerdas "*smart village*" adalah pengembangan masyarakat dari desa dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan secara cerdas dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan kapasitas sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif di desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan melibatkan partisipasi masyarakat.⁴¹

Menurut Brian Heap istilah "*smart village*" yaitu adanya fokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka dan menyerukan partisipasi mereka dalam pemerintahan desa dan kewajiban pemerintah desa kepada masyarakat. Hak-hak ini mencakup hak-hak mendasar atas ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya.. dengan adanya istilah dari "*smart village*" tersebut pemerintah desa diharapkan bisa serta mampu untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat desa seperti yang

⁴¹ Dyah Nurfarida A, "Penerapan Smart Village Pada Pengembangan Bumdes Di Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang," *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, n.d., 102–6.

didapatkan oleh masyarakat kota namun dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada di desa.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan “*smart village*” pada pemerintah Desa Bermi, dalam pelaksanaannya memang pemerintah desa menerapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. yang mana dalam implementasinya bisa dilihat melalui program-program yang ada pada pemerintah Desa Bermi dengan berbagai dimensi-dimensi yang ada pada konsep model “*smart village*”, seperti contoh adanya Program Inovasi Desa (PID) dari Kementerian Desa (KEMENDESA), Desa Bermi membuat Program Inovasi Desa dengan mendirikan yang namanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) dalam menerapkan konsep model “*smart village*”. Diantaranya yaitu ada pemerintahan yang cerdas (*smart governance*), masyarakat yang pintar (*smart community*), ekonomi yang kuat (*smart economy*), dan lingkungan yang cerdas (*smart environment*).

Hal diatas juga sama seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sudah menerapkan yang namanya “*smart village*” melalui program-program yang ada pada pemerintah Desa Bermi dengan berbagai dimensi-dimensi yang ada pada konsep model “*smart village*”:

“Ya mas, itu salah satu bagian dari usaha kami, jadi sebetulnya selain adanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang telah berjalan, ini kan karena Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini berada dibawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera, jadi kami berusaha dan mempunyai pemikiran yang jauh kedepan terkait dengan semua anggaran yang masuk di Desa Bermi. kalau kita hanya sekedar nyagerke (mengharap) bantuan yang suatu saat kalau kita sudah tidak ada bantuan, kita kan harus mandiri. Karena itu ya salah satunya usaha yang dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera termasuk di unitnya, salah satu di unitnya yaitu terdapat unit Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB). Kemudian yang lain ini untuk Desa Bermi saya juga berharap memiliki sebuah usaha lagi yaitu yang dikelola oleh Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) itu sendiri. terkait dengan desa

⁴² Tia Subekti and Ratnaningsih Damayanti, “Penerapan Model Smart Village Dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang,” *Journal of Public Administration and Local Governance* 3, no. 1 (2019): 18–28.

agro wisata, jadi ini secara aturan sudah kami susun, dan kemudian kami juga sudah laksanakan ditahun kemaren, dan untuk agro wisata ini sudah mulai berjalan, semoga saja nanti tahun depan sudah bisa melaksanakan kegiatan, di agro wisata itu sendiri ini karena agro jadi kami mengedepankan kelestarian lingkungan hidup yang nanti disana ada tanaman hortikultura yang bisa dikembangkan seperti yang sudah kita tanam yaitu ada bibit kelapa muda ini sekitar 80 an bibit yang sudah ditanam disana, dan juga ada bibit tanaman kelengkeng juga sudah kami budayakan disana, semuanya bertujuan untuk agar desa bermi punya Pendapatan Asli Desa (PAD).⁴³

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya adanya Program Inovasi Desa (PID) yang mendirikan sebuah komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) adalah salah satu dari usaha pemerintah Desa Bermi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi untuk bisa menunjang perekonomian desa, jadi sebetulnya selain adanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang telah berjalan, pemerintah Desa Bermi berusaha dan mempunyai pemikiran yang jauh kedepan terkait dengan semua anggaran yang masuk pada pemerintah Desa Bermi, kalau pemerintah Desa Bermi hanya mengharap bantuan dana yang suatu saat kalau sudah tidak ada bantuan, pemerintah desa harus bisa mandiri untuk bisa menunjang tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Di masa sekarang desa kini sudah dianggap mampu untuk berkembang dan berinovasi dalam pengentasan masalah-masalah yang ada di desa masing-masing. maka dari itu desa kini didorong untuk maju serta mandiri dengan bisa menerapkan yang namanya “*good governance*” untuk mewujudkan konsep model “*smart village*” di ranah desa, dengan harapan adanya suatu model penerapan “*smart village*” pada pemerintah desa, Pertumbuhan desa ke depan dapat dimajukan melalui pengembangan berbagai potensi desa.⁴⁴ apalagi dengan dukungan yang kuat dari pemerintah berupa infrastruktur dan keuangan

⁴³ Hasil Wawancara dengan Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.00–10.30 WIB di Kantor Pemerintah Desa Bermi.

⁴⁴ Agyztia Premana, Hendri Sucipto, and Agung Widianoro, “Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja),” *JILPI: JURNAL ILMIAH PENGABDIAN DAN INOVASI* 1, no. 1 (2022): 43–54.

desa, serta pemerintah daerah untuk membiayai pertumbuhannya, yang benar-benar bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup di pedesaan dan menurunkan angka kemiskinan.

Hal tersebut juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Azka Najmus Tsaqib M.Pd selaku Pendamping Desa yang menjelaskan bahwasanya pemerintahan Desa Bermi sudah menerapkan konsep “*smart village*” pada pemerintah Desa Bermi:

“Untuk “*smart village*” itu sendiri, atau bisa dikatakan desa cerdas lah, nah itu kan secara teori ya, tapi untuk kementerian desa (KEMENDESA) sendiri belum dijelaskan secara signifikan terkait “*smart village*”, mungkin “*smart village*” berdasarkan teori yang ada itu kan menunjukkan berbagai aspek-aspek yang mengacu pada desa cerdas. Atau desa yang dalam kategori di kementerian desa itu ada desa yang mandiri, ada desa yang maju, dan ada desa yang tertinggal. Nah mungkin masuknya “*smart village*” di kecamatan gembong itu belum banyak yang tahu terkait dengan “*smart village*”. Namun di Desa Bermi ini sendiri memang lebih bisa dikatakan seperti “*smart village*” karena dari IDM dari kementerian desa (KEMENDESA) yang mana IDM ini singkatan dari Indeks Desa Membangun itu dimana penilaian dari sebuah desa itu maju, mandiri itu nilainya diambilkan dari situ. Makanya tentu “*smart village*” mungkin hampir miriplah dengan teori IDM yang ada di kementerian desa (KEMENDESA).”⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya terkait “*smart village*” atau bisa dikatakan desa cerdas berdasarkan teori yang ada itu menunjukkan berbagai aspek-aspek yang nantinya mengacu pada desa cerdas. Namun istilah dari desa yang dalam kategori pada kementerian desa (KEMENDESA) itu terdiri dari desa yang mandiri, ada desa yang maju, dan ada desa yang tertinggal. Masuknya konsep dari “*smart village*” itu sendiri di Desa Bermi memang lebih bisa dikatakan seperti “*smart village*”. Karena dari IDM kementerian desa (KEMENDESA), yang mana IDM ini singkatan dari Indeks Desa Membangun itu dimana penilaian dari sebuah desa itu maju, mandiri itu nilainya diambilkan dari situ, dan Desa Bermi salah satu yang termasuk dalam nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat lagi oleh pendapat Bapak Azka Najmus Tsaqib M.Pd yang menjelaskan bahwasanya pemerintah

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Azka Najmus Tsaqib M.Pd sebagai Pendamping Lokal Desa Bermi, pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Azka Najmus Tsaqib M.Pd.

Desa Bermi dalam menerapkan yang namanya “*smart village*” guna untuk bisa mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan desanya dengan mengikuti prosedur dan aturan-aturan yang ada:

“Kalau menurut dari TPP kemendesa itu sendiri mas, nah TPP kemendesa itu kan lebih mengarah kepada perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan desa, dimana program TPP kemendesa itu kan banyak sekali di desa mas, ada namanya musyawarah desa (MUSDES), ada yang namanya musyawarah khusus, peraturan desa dan masih banyak yang lainnya. Nah mungkin salah satu cara untuk mewujudkan desa cerdas contohnya di Desa Bermi ini, kalau di desa itu bisa lewat musyawarah dusun (MUSDUS) dulu terus musyawarah desa (MUSDES) sehingga nantinya menjadikan sebuah peraturan kepala desa, karena peraturan yang paling tinggi di pemerintah desa adalah peraturan kepala desa.”⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya TPP kemendesa itu fokusnya lebih mengarah kepada pendampingan desa mulai dari sebuah perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan desa, dimana program TPP kemendesa itu kan banyak sekali dan semuanya di ranah desa, salah satunya ada program yang namanya pendampingan musyawarah desa (MUSDES), ada yang namanya pendampingan musyawarah khusus dan masih banyak yang lainnya. Dan salah satu cara untuk mewujudkan desa cerdas kalau di Desa Bermi itu bisa lewat yang namanya musyawarah guna menegakkan asas demokrasi di ranah desa, seperti halnya TPP kemendesa itu ada pendampingan pada musyawarah dusun (MUSDUS) dulu, terus dilanjutkan dengan musyawarah desa (MUSDES) sehingga nantinya menjadikan sebuah peraturan kepala desa, karena peraturan yang paling tinggi di pemerintah desa adalah peraturan kepala desa.

Bila dilihat dari beberapa hasil wawancara diatas bahwasanya konsep dari “*smart village*” merupakan suatu bagian dari alternatif solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan klasik yang tengah ada di Desa Bermi selama ini demi mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa.⁴⁷

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Azka Najmus Tsaqib M.Pd sebagai Pendamping Lokal Desa Bermi, pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Azka Najmus Tsaqib M.Pd.

⁴⁷ Hafny Aisyatul Huda, Utang Suwaryo, and Novie Indraswari Sagita, “PENGEMBANGAN DESA BERBASIS SMART VILLAGE (Studi Smart Governance

yang mana permasalahan klasik yang selama ini terjadi di desa semakin lama semakin kompleks dan bisa sampai berkepanjangan, sehingga akhirnya dibutuhkan alternatif serta solusi terlebih kini zaman semakin modern ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan bahkan di dunia sudah banyak mengupgrade cara dan proses tradisional dalam pola pikir, berinteraksi, dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Bermi.

Pemerintah Desa Bermi telah mewujudkan serta menerapkan konsep “*smart village*” melalui empat dimensi dari konsep “*smart village*” untuk bisa mewujudkan kemajuan dan kemandirian Desa Bermi kedepan. Keempat dimensi tersebut yaitu :

a. Pemerintah yang cerdas (*smart governance*)

Dalam struktur desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari unsur masyarakat yang dasar dan orientasi kebijakan pemerintah desa yang dilaksanakan sepenuhnya ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks praktis, diwujudkan kedalam empat fungsi dalam tanggung jawab pemerintah desa diantaranya yaitu mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membimbing, dan memberdayakan masyarakat serta menunjukkan bagaimana hal itu dilakukan. dimana masing-masing dari keempat tugas tersebut sepenuhnya terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Penyelenggaraan pemerintahan sendiri merupakan bentuk penyelenggaraan fungsi pemerintah desa sebagai struktur organisasi pemerintah terendah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri termasuk di dalamnya pelayanan publik kepada masyarakat, dimana dalam konteks “*smart village*”, adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa akan dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara *efektif* dan *transparan* kepada masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi secara umum dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pemerintah desa.⁴⁸

Pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang),” *Jurnal Moderat* 6 (2020): 539–56.

⁴⁸ Dian Herdiana, “Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages” 21, no. 1 (2019): 7.

b. Masyarakat yang pintar (*smart community*)

Smart community atau yang bisa disebut dengan masyarakat yang pintar dalam artian dapat membantu pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan. dimana penggunaan teknologi komunikasi akan memungkinkan komunitas cerdas "*smart community*" ini untuk berkontribusi pada pemerintahan di masa depan. dengan tujuan adanya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat maka diharapkan dapat menumbuhkan sikap keterjalinan antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pembangunan desa.⁴⁹

c. Ekonomi yang pintar (*smart economy*)

Smart economy atau yang bisa disebut Ekonomi pintar (inovasi dan persaingan) menunjukkan bahwa ketika penemuan baru berkembang, lebih banyak kemungkinan bisnis baru juga akan muncul dan tingkat persaingan dalam bisnis dan pasar modal juga akan meningkat.⁵⁰

d. Lingkungan yang cerdas (*smart environment*)

Lingkungan perdesaan dalam konteks "*smart village*" tidak hanya diartikan sebagai lingkungan alam yang ada di desa, melainkan keseluruhan elemen yang membentuk satu tatanan sosial alam yang mencirikan karakter dari desa. Lingkungan perdesaan dalam tatanan sosial terdiri dari adat, budaya dan struktur sosial. Dikaitkan dengan konteks "*smart village*", maka lingkungan cerdas "*smart environment*" dalam hal ini adalah kombinasi dari hal-hal tersebut yang terkait dengan filosofi lingkungan hidup baik dari adat, budaya serta struktur sosial.⁵¹

Dari analisis hasil penelitian diatas bisa dilihat berbagai implementasi-implementasi yang telah dilakukan pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan dari keempat dimensi-dimensi "*smart village*" pada pemerintah Desa Bermi melalui yang namanya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di dalam tabel di bawah ini:

⁴⁹ Sangaji Maulana, Dian Kagungan, and Ita Prihantika, "Sinergitas Pelaksanaan Program Smart Village Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran," *Jurnal Administrativa* 4, no. 1 (2022): 101–13.

⁵⁰ Ikram Maulidin, "Smart Governance Dalam Layanan Terpadu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kota Makassar" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

⁵¹ Dian Herdiana, "Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages" 21, no. 1 (2019): 9.

Tabel 4.14
Hasil pelaksanaan dimensi-dimensi dalam mewujudkan *smart village* pada pemerintah Desa Bermi melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB)

No	Dimensi <i>smart village</i>	Bentuk Pelaksanaan
1.	Pemerintahan yang cerdas (<i>smart governance</i>)	Terwujudnya adanya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) dalam program inovasi desa (PID) di Desa Bermi.
2.	Masyarakat yang pintar (<i>smart community</i>)	Berdirinya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) adalah bentuk partisipasi dari masyarakat untuk mengubah pola pikir masyarakat desa untuk tetap saling bantu membantu dalam memajukan desa, khususnya dalam sektor kebersihan lingkungan desa.
3.	Ekonomi yang pintar (<i>smart economy</i>)	Adanya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) adalah bentuk sebagian dari masyarakat yang sudah memahami pentingnya sampah untuk dijadikan penghasilan bagi masyarakat desa maupun pemerintah.
4.	Lingkungan yang cerdas (<i>smart environment</i>)	Hadirnya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) adalah bentuk sebagian dari masyarakat yang sudah memahami pentingnya sampah agar tidak membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan wabah penyakit, akibat membuang sampah disembarang tempat.

Sumber: diolah penulis berdasarkan data Hasil pelaksanaan dimensi-dimensi dalam mewujudkan *smart village* pada pemerintah Desa Bermi melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemerintah Desa Bermi Dalam Mewujudkan *Smart Village* Melalui Bank Sampah Tunas Bringin.

Pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan yang namanya sebuah desa cerdas "*smart village*" adalah sebuah proses multidimensional yang bisa mencakup dalam berbagai perubahan, yang mana adalah bagian dari sebuah pembangunan. Baik pembangunan yang meliputi dari struktur sosial, pertumbuhan ekonomi, sikap dari masyarakat, serta pengentasan kemiskinan.⁵²

Berbicara terkait pembangunan, pada proses pembangunan nantinya harus bisa mencerminkan terhadap perubahan kepada masyarakat atau dapat menyesuaikan sistem sosial tanpa harus mengubah bahkan sampai meninggalkan sebuah keragaman serta keinginan individu maupun kelompok. agar hal ini dapat menjadikan kondisi sosial yang lebih baik lagi dan dapat bergerak maju, baik maju dalam hal materil maupun spiritual. hal ini sama dengan pendapat dari suryono bahwa proses pembangunan merupakan upaya yang diterapkan dan dilaksanakan dari kegiatan atau program dari pemerintah untuk masyarakat sebagai pembangunan.⁵³

Disini pemerintah Desa harus mengalami yang namanya sebuah pembangunan, dimana sebuah desa mampu menunjukkan sebuah perubahan pembangunan tanpa harus meninggalkan ragam kebutuhan dan keinginan baik secara individual maupun kelompok. dalam hal ini pemerintah Desa Bermi bersama dengan masyarakat Desa Bermi membuat yang namanya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi guna mewujudkan sebuah perubahan untuk menjadikan desa cerdas "*smart village*" di Desa Bermi. Dengan adanya pembangunan desa maka tidak dapat dijauhkan dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasinya, berikut dibawah ini akan dijelaskan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan "*smart village*" melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB).

⁵² Ahmad Shukri Mohd Nain and Rosman Md Yusoo, *Konsep, Teori, Dimensi Dan Isu Pembangunan*, ed. Issham Ismail, Pertama (Joho Darul Takzim: Universiti Teknologi Malaysia, 2003).

⁵³ Agus Suryono, "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat," *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2018): 98–102, <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>.

1. Faktor Pendukung

Menurut Huraerah terdapat beberapa faktor pendukung untuk menunjang keberhasilan dari sebuah pembangunan diantaranya yaitu :⁵⁴

- a) Dengan adanya kepekaan masyarakat mengenai lingkungan sosial, sehingga dapat mengetahui permasalahan yang ada.
- b) Dengan adanya keinginan dan ikut serta masyarakat dalam mencari jalan alternatif untuk memecahkan suatu masalah.
- c) Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam melaksanakan serta memonitoring program kegiatan sosial.
- d) Dengan adanya penyebaran metode swadaya berswadaya
- e) Dengan adanya bimbingan bantuan dari pemerintah. Hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam penggunaan prosedur berdasarkan undang-undang yang ada, bimbingan dan pengarahan teknis, penetapan standar pelayanan dan bantuan maupun subsidi.

Hal tersebut juga sama disampaikan oleh Bapak Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi yang menjelaskan bahwasanya adanya beberapa faktor pendukung dalam menciptakan Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) guna mewujudkan desa cerdas “*smart village*” di Desa Bermi.

“Ini yang menjadi faktor pendukung, pemerintah Desa Bermi sendiri disetiap tahun ini kan sudah memberikan anggaran tambahan untuk kegiatan Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB), kemudian dari dinas Lingkungan Hidup juga selalu memantau dan memperhatikan, juga kemudian dari Bank Sampah Induk (BSI) juga berkerjasama dengan Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) setiap kali ada sampah yang baik sudah diolah ataupun yang belum diolah itu bisa disetorkan ke Bank Sampah Induk (BSI).”⁵⁵

Dari pendapat wawancara diatas menjelaskan bahwasanya yang menjadi faktor pendukung, yaitu adanya pemerintah Desa Bermi sendiri pada setiap tahunnya sudah memberikan alokasi anggaran tambahan untuk kegiatan Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB), kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga selalu memantau dan memperhatikan,

⁵⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Humaniora, 2011).

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.00–10.30 WIB di Kantor Pemerintah Desa Bermi.

kemudian dari Bank Sampah Induk (BSI) juga berkerjasama dengan Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB), dan itu menjadikan sebuah salah satu faktor pendukung bagi pemerintah Desa Bermi dengan terbantunya hadirnya komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) Dalam mewujudkan yang namanya desa cerdas “*smart village*”.

Pendapat Bapak Sutisno S.P diatas juga ditegaskan oleh Bapak Bahrudin S.Kom yang juga menjelaskan terkait adanya faktor pendukung terciptanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB), beliau menjelaskan bahwa:

“ya mas, untuk faktor pendukung terciptanya adanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) juga tidak terlepas dari segi dukungan pemerintahan Desa Bermi serta mitra kerja yang telah ada, terkait mitra kerja itu sendiri yang pertama, yang sangat mendukung sekali itu dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati, dalam terciptanya Bank Sampah Tunas Bringin di Desa Bermi, terus yang kedua yaitu dari Bank Sampah Kabupaten Pati/Induk (BSI), terus satu lagi yaitu mitra tukang rosok sekitar itu bagian dari mitra kita mas, karena apa? Karena tanpa mereka dari segi pemerintahan sendiri dan UMKM itu tidak akan berjalan lancar, jadi harus ada ketiga pilar tersebut.”⁵⁶

Dari pendapat wawancara diatas menjelaskan bahwasanya terkait faktor pendukung sendiri dalam terciptanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) tidak terlepas dari segi adanya dukungan pemerintahan Desa Bermi serta mitra kerja yang telah ada, terkait mitra kerja itu sendiri yang pertama, yang sangat mendukung sekali baik dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati, terus dari Bank Sampah Kabupaten Pati/Induk (BSI), serta tukang rosok sekitar yang telah menjadi bagian dari mitra kerja.

Selain yang disebutkan diatas faktor pendukung terciptanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) dalam mewujudkan “*smart village*” di desa bermi yaitu karena adanya faktor pendukung dari dampak sampah serta lingkungan yang ada di Desa Bermi, karena nantinya akan berdampak terhadap kesehatan manusia, berdampak terhadap lingkungan, dan berdampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan H. Kuhari M.Si sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa Bermi, pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30-16.30 WIB di Rumah Bapak H. Kuhari M.Si.

seperti halnya berdampak terhadap kesehatan manusia yaitu jika lokasi serta pembuangan sampah yang tidak terkontrol hal tersebut merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik perhatian bagi berbagai binatang seperti lalat dan nyamuk yang dapat menjangkitkan penyakit. Yang mana potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a) Penyakit diare, infeksi saluran pernafasan (*ispa*), *kolera*, *tifus* menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat dapat bercampur dengan air minum. Serta penyakit demam berdarah (*haemorgafic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- b) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
- c) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan, salah satu contoh adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (*taenia*). Dimana cacing ini sebelum masuk kedalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah.⁵⁷

Selanjutnya yang dari dampak terhadap lingkungan yaitu cairan dari rembesan sampah yang masuk kedalam *drainase* atau sungai pastinya akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan nantinya dapat mati sehingga beberapa spesies pastinya akan lenyap, hal ini akan mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Pengurain sampah yang dibuang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti *metana*. Selain berbau tidak sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak. dan pastinya kerusakan yang paling cepat adalah pencemaran udara, dimana ketika sampah mulai membusuk, maka bau yang tidak sedap tersebut akan tercium hingga radius ratusan meter dari tempat pembuangan sampah tersebut.

Yang terakhir yaitu dari dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi:

- a) Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat sekitar, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang sangat buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.

⁵⁷ Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih Dan Kemapanan Finansial*, ed. Ari, pertama (Bantul, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020): 20.

- b) Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- c) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
- d) Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
- e) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang dipengaruhi untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan, hal inilah yang mengakibatkan jalan itu perlu dan sering di bersihkan dan diperbaiki.⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwasanya pembangunan Desa Bermi dengan menciptakan yang namanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) guna mewujudkan yang namanya desa cerdas "*smart village*" di Desa Bermi tentu mempunyai faktor pendukung yang dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik lagi. Hal ini yang dimaksud yaitu harus memperbaiki sumber daya manusia, lingkungan hidup dan perekonomian desa. Dengan demikian Desa Bermi untuk mewujudkan program "*smart village*" mempunyai potensi sumber daya manusia yang tinggi, hal ini sangat berpengaruh untuk mewujudkan program "*smart village*". Karena dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka mampu untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi di desa.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan suatu program kegiatan faktor penghambat pastinya ada karena adanya sebuah hambatan, hambatan bisa saja muncul baik dalam proses untuk mencapai suatu tujuan maupun dalam menjalankan suatu program tersebut. Menurut pendapat Bambang Sunggono yang mengatakan bahwasanya dalam pelaksanaan suatu program itu mempunyai faktor penghambat dengan kurangnya ketetapan internal maupun eksternal dari program yang akan dilaksanakan, kekurangan terhadap program yang akan

⁵⁸ Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih Dan Kemapanan Finansial*, ed. Ari, pertama (Bantul, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020): 21.

dilaksanakan terkait dengan biaya atau dana dan tenaga manusia dan lain sebagainya.

Hal tersebut dialami oleh pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan desa cerdas "*smart village*" melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi. dimana pemerintah Desa Bermi sendiri dengan adanya Program Inovasi Desa (PID) dari Kementerian Desa, pemerintah Desa Bermi telah melihat dan mengamati potensi yang bagus untuk membuat program inovasi yang cocok diterapkan di Desa Bermi.

Dengan pertumbuhan ekonomi di Desa Bermi disetiap tahunnya, pastinya telah meningkat juga taraf kehidupan penduduknya, sehingga peningkatan pendapatan di Desa Bermi ini ditunjukkan dengan pertumbuhan kegiatan produksi dan konsumsi. Pertumbuhan ini juga yang membawa pada penggunaan sumber semula jadi yang lebih besar dan pengeksploitasian lingkungan untuk keperluan industri, bisnis serta aktivitas sosial. sehingga pengurusan sampah sering mengalami masalah.

Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan dengan baik nantinya akan mengakibatkan masalah yang besar. Karena penumpukan sampah atau membuangnya secara sembarangan di kawasan yang terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan ke saluran air tanah, demokian juga dalam pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air bahkan bisa saja menjadi banjir.⁵⁹

Menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif dalam pengelolaanya. Dan alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam. Daripada mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus meningkat, minimalisasi sampah harus dijadikan prioritas utama.

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Nur Aksin selaku Ketua Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) terkait beberapa

⁵⁹ Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih Dan Kemapanan Finansial*, ed. Ari, pertama (Bantul, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020): 38.

kendala dalam pengelolaan sampah di Desa Bermi, beliau menjelaskan bahwasanya :

“Terkait Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi itu sendiri, dalam pengelolaannya serta mengembangkan Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) pastinya juga terdapat suatu kendala mas, biasanya itu kendala di lapangan mas, contohnya saja dalam berdirinya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini saja, dulu itu kita sangat sulit untuk meyakinkan warga untuk bergabung di Bank Sampah kami mas, dan kami dulu dianggap sebelah mata sama masyarakat saat awal-awal berdiri mas, dan itu salah satu kendala yang dialami oleh saya dan teman-teman saat awal-awal komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini berdiri mas, seiring berjalanya waktu akhirnya dengan tekad yang kuat dengan kegigihan teman-teman untuk membuktikan keberadaan dan kontribusi Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) kepada masyarakat, akhirnya banyak masyarakat yang ikut gabung dengan kami alhamdulillah mas, namun proses memang memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya dan teman-teman mas, karena apa, setelah komunitas kita sudah diakui oleh masyarakat atas kontribusinya, kendala-kendala di lapangan pun silih berganti berdatangan mas.”⁶⁰

Dari pendapat wawancara diatas menjelaskan bahwasanya Pada komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi, dalam pengelolaannya serta mengembangkan Komunitas Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) pastinya juga terdapat suatu kendala, dan kebiasaan kendala tersebut muncul di faktor lapangan, faktor penghambatnya pastinya karena faktor itu akan muncul jika sudah mengetahui apa penyebabnya, mungkin bisa dikatakan untuk kendala-kendala yang ada itu semua adalah bagian dari proses serta lika-liku perjuangan selama ini, dengan faktor-faktor yang masih perlu adanya pengalaman lebih luas lagi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Sutrisno S.P yang menjelaskan terkait kendala atau faktor penghambat dalam menciptakan komunitas Bank Sampah

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Nur Aksin sebagai Ketua Bank Sampah Tunas Bringin Desa bermi, pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 18.30-20.30 WIB di Rumah Bapak Nur Aksin.

Tunas Bringin (BSTB) dalam mewujudkan yang namanya desa cerdas (*smart village*).

“Jadi begini mas, jika berbicara terkait kendalanya, itu sangat banyak kendalanya mas, termasuk retribusi dari nasabah yang ikut Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) disetiap bulannya itu belum seimbang atau balance dalam operasionalnya namun juga bisa memberikan pendapat yang bisa dikatakan lebih dari cukup. Namun dari saya selaku Kepala Desa Bermi disini berpandangan bahwasanya keuntungan dari Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini bukan semata-mata dari tujuan kami tapi melainkan yang terpenting sampah-sampah ini bisa mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di Desa Bermi. Jadi faktor penghambatnya yang paling utama yaitu kesadaran sebagian dari masyarakat untuk bergabung di Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini perlu ditingkatkan lagi biar keuntungannya tambah meningkat lagi dan tidak membuang sampah sembarangan lagi.”⁶¹

Dari pendapat wawancara diatas menjelaskan bahwasanya jika berbicara terkait kendala atau faktor penghambat, itu pasti ada, contohnya termasuk retribusi dari nasabah yang ikut Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) disetiap bulannya itu belum seimbang atau balance dalam operasionalnya namun juga bisa memberikan pendapat yang bisa dikatakan lebih dari cukup. Namun kendala itu tidak mempengaruhi pada awal-awal berdirinya komunitas bank sampah ini, karena tujuan kami yaitu melainkan yang terpenting sampah-sampah yang ada di desa ini bisa mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di desa bermi. Jadi faktor penghambatnya yang paling utama yaitu mengubah pemikiran dari masyarakat dan memberikan kesadaran sebagian dari masyarakat untuk saling mensuport program Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penghambat dalam mewujudkan program desa cerdas “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di Desa Bermi ini perlu diakui pastinya ada, namun faktor penghambat tersebut bisa di minimalisir dengan beberapa alternatif-alternatif yang telah dilakukan bersama-sama, yang mana semula banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sekarang ikut dalam

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Sutrisno S.P selaku Kepala Desa Bermi pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.00–10.30 WIB di Kantor Pemerintah Desa Bermi.

program Bank Sampah agar bisa meminimalisir bahaya sampah itu sendiri. sehingga program “*smart village*” ini telah berjalan dengan adanya sistem politik dari pemerintah Desa Bermi dengan dibarengi adanya partisipasi dari masyarakat Desa Bermi serta mitra kerja yang telah berkerjasama dengan pihak pemerintah desa maupun Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) sendiri.

